

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh perubahan Perka BPKP terhadap penilaian mandiri serta evaluasi kapabilitas APIP, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan penilaian kapabilitas APIP berdasarkan penilaian mandiri dengan hasil evaluasi BPKP terhadap Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, serta menjelaskan upaya dan hambatan yang dihadapi dalam peningkatan kapabilitas APIP di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Perka BPKP memengaruhi proses penilaian mandiri oleh APIP maupun proses evaluasi oleh BPKP. Perbedaan penilaian kapabilitas APIP berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan evaluasi oleh BPKP disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran dalam memenuhi AOI dan topik/kriteria pada masing-masing elemen. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta yakni dengan melakukan tindak lanjut atas AOI hasil evaluasi BPKP. Hambatan dalam meningkatkan kapabilitas APIP berupa kurangnya daya tarik, keberadaan bukti dukung yang tidak lengkap, keterbatasan jumlah APIP, keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, banyaknya penugasan mandatory, serta adanya keterlibatan dari pihak (OPD) lain dalam proses peningkatan kapabilitas APIP.

Kata kunci: penilaian, evaluasi, kapabilitas, APIP, BPKP

Abstract

This study aims to explain the effect of changes in BPKP Regulation on self-assessment and evaluation of APIP capabilities, identify factors that influence differences in APIP capability assessments based on self-assessment with BPKP evaluation results on the Yogyakarta Special Region Inspectorate, and explain efforts and obstacles faced in improving APIP capabilities at the Yogyakarta Special Region Inspectorate. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data used are primary data obtained through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that changes in BPKP Regulation affect the self-assessment process by APIP and the evaluation process by BPKP. Differences in APIP capability assessments based on self-assessment results with BPKP evaluation results are due to differences in interpretation in fulfilling AOI and topics/criteria in each element. The efforts made by the Yogyakarta Special Region Inspectorate are by following up on the AOI results of the BPKP evaluation. Obstacles in improving APIP capabilities include lack of attraction, incomplete supporting evidence, limited number of APIPs, limited opportunities to improve competency, many mandatory assignments, and involvement of other parties (OPD) in the process of improving APIP capabilities.

Keywords: assessment, evaluation, capability, APIP, BPKP